



## Kekuasaan Dalam Tradisi: Kajian Dinasti Politik di Desa Banrimanurung Kabupaten Jeneponto

Muh. Fichriyadi Hastira<sup>\*1</sup> , Galank Pratama<sup>2</sup> , Widya Astuti<sup>3</sup> , Muh. Zuhud Al Khaer Zahir<sup>4</sup> 

<sup>13</sup> Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Jambi, Jambi, 36361, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Megarezky, Makassar, 90234, Indonesia

\*Corresponding Author: [muhfichriyadihastira@fisip.unmul.ac.id](mailto:muhfichriyadihastira@fisip.unmul.ac.id)

### ARTICLE INFO

Received 01 December 2024

Revised 16 May 2025

Accepted 26 July 2025

Available online 30 July 2025

E-ISSN: 0216-9290

### How to cite:

Hastira, M. F. et al. (2025). Kekuasaan Dalam Tradisi: Kajian Dinasti Politik di Desa Banrimanurung Kabupaten Jeneponto. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 17 (2), 105-115.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that support the sustainability of political dynasties in Banrimanurung Village, West Bangkala Sub-district, Jeneponto Regency. This phenomenon attracts attention because political dynasties are often considered contrary to modern democratic principles, but in Banrimanurung, the Karaeng family has managed to maintain their power for several generations. The main issue raised is how tradition and social structure support the sustainability of political dynasties in the context of local democracy. The method used is a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with community leaders, political dynasty families, and local residents, participatory observation, and documentation studies. Data analysis was done thematically using Antonio Gramsci's hegemony and patron-client theoretical frameworks to explain the dynamics of power and legitimacy of political dynasties. The results show that the sustainability of political dynasties in Banrimanurung Village is supported by four main factors: traditional legitimacy derived from the symbol of kekarraengan, the influence of customary values such as pangngadakkang, patron-client relationships that create economic dependence, and the flexibility of the Karaeng family in adapting to the modern democratic system. The findings suggest that political dynasties at the local level can survive through synergies between traditional values, economic control, and political adaptation strategies. This study provides important insights into how tradition and local democracy can coexist in Indonesia.

**Keyword:** Political Dynasty, Karaeng, Village Head Election, Culture.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan dinasti politik di Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Fenomena ini menarik perhatian karena dinasti politik sering dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi modern, tetapi di Banrimanurung, keluarga Karaeng berhasil mempertahankan kekuasaan mereka selama beberapa generasi. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana tradisi dan struktur sosial mendukung keberlanjutan dinasti politik dalam konteks demokrasi lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, keluarga dinasti politik, dan warga setempat, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci dan patron-klien untuk menjelaskan dinamika kekuasaan dan legitimasi dinasti politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan dinasti politik di Desa Banrimanurung didukung oleh empat faktor utama: legitimasi tradisional yang berasal dari simbol kekarraengan, pengaruh nilai-nilai adat seperti pangndakkang, hubungan patron-klien yang menciptakan ketergantungan ekonomi, dan fleksibilitas keluarga Karaeng dalam beradaptasi dengan sistem demokrasi modern. Temuan ini menunjukkan bahwa dinasti politik di tingkat lokal dapat bertahan melalui sinergi antara nilai-nilai tradisional, kontrol ekonomi, dan strategi adaptasi politik. Studi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana tradisi dan demokrasi lokal dapat hidup berdampingan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Dinasti Politik, Karaeng, Pemilihan Kepala Desa, Budaya.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

## 1. Pendahuluan

Dinasti politik di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, terutama di tingkat lokal. Fenomena ini tidak hanya melibatkan regenerasi kekuasaan dalam lingkaran elit tertentu, tetapi juga mengakar pada struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Kemunculan dinasti politik di ranah lokal dapat ditelusuri sejak pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001 dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005 (Dona, 2022). Kedua kebijakan ini membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, namun di sisi lain menciptakan peluang bagi elit lokal untuk mendominasi sistem pemerintahan dengan cara mempertahankan kekuasaan dalam lingkup keluarga (Agus Dedi, 2022). Sebagaimana dicatat oleh Dona (2022), proses ini dikenal sebagai restrukturisasi kekuasaan, yaitu kembalinya dominasi elit lokal di era demokrasi melalui berbagai mekanisme yang terlihat demokratis tetapi pada dasarnya eksploitatif.

Restrukturisasi kekuasaan ini memperlihatkan kemampuan elit lokal untuk mengontrol kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat melalui simbol-simbol kekuasaan (Gunanto, 2020). Otonomi daerah telah menciptakan struktur kekuasaan baru di mana elit lokal mampu memobilisasi dukungan rakyat dengan mengandalkan jaringan patron-klien (Sujarwoto, 2015). Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya dilihat sebagai hasil dari proses demokrasi formal tetapi juga sebagai hasil dari strategi politik yang mengakar pada sistem sosial dan budaya lokal. Hal ini tampak jelas dalam praktik politik dinasti yang semakin berkembang pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dinasti politik pada dasarnya adalah proses regenerasi kekuasaan yang terencana untuk mempertahankan dominasi kelompok elit tertentu (Harjudin & Zuada, 2020). Menurut Leo Agustinus (2014), politik dinasti dapat diibaratkan sebagai "kerajaan politik," di mana anggota keluarga, kerabat dekat, atau sekutu politik dari elit petahana ditempatkan pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal tetapi juga di tingkat nasional, dengan pola yang semakin kompleks (Agustinus, 2014). Syamsul Hidayat & Eko Wardani (2022) mengidentifikasi tiga struktur utama politik dinasti di Indonesia: model arisan, di mana kekuasaan diwariskan dalam satu keluarga; model bercabang, di mana anggota keluarga menguasai berbagai posisi strategis secara simultan; dan model lintas wilayah, di mana satu keluarga mendominasi kekuasaan di beberapa daerah. Ketiga model ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas dinasti politik dalam menghadapi perubahan konstitusi maupun struktur pemerintahan.

Di tingkat lokal, salah satu contoh yang menarik adalah praktik dinasti politik di Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki sejarah panjang dominasi Keluarga Kerajaan Bangkala, yang telah memengaruhi struktur sosial dan politik masyarakat setempat sejak abad ke-16 (Hadrawi, 2017). Kerajaan Bangkala merupakan salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan, dengan wilayah kekuasaan yang mencakup sebagian besar Kabupaten Jeneponto bagian barat. Hingga saat ini, masyarakat Desa Banrimanurung masih menghormati hukum adat dan budaya yang diwariskan dari kerajaan tersebut, termasuk dalam hal memilih pemimpin mereka.

Tradisi kepemimpinan yang berbasis pada garis keturunan ini telah melanggengkan kekuasaan keluarga tertentu dalam pemerintahan desa (Marwiyah, Wicaksona, Wahyuni, Kharimah, & Tiantoro, 2022). Kepala desa pertama, Pattaduri Karaeng Bainea, adalah saudara laki-laki Raja Bangkala. Selanjutnya, kepemimpinan desa diteruskan oleh Andi Baso Jaya, atau Karaeng Baso, yang juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan. Tradisi ini berlanjut hingga masa kepemimpinan Andi Rustam BJ Karaeng Lolo, yang dikenal sebagai "naga merah" karena supremasi politiknya yang absolut. Karaeng Lolo memimpin Desa Banrimanurung selama dua periode dan tetap menjadi figur berpengaruh hingga saat ini. Hampir seluruh tanah di desa tersebut dimiliki oleh keluarga Karaeng Lolo, menciptakan dominasi ekonomi yang memperkuat posisi politik mereka.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan keluarga kerajaan dalam mempertahankan kekuasaan tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem sosial yang feodal dapat menjadi alat legitimasi politik (Firdaus & Andriyani, 2021). Sebagian besar masyarakat Desa Banrimanurung masih tunduk pada sistem sosial yang diwariskan oleh Kerajaan Bangkala, yang membagi masyarakat menjadi tiga kelas utama: bangsawan (*karaeng*), masyarakat biasa (*to maradeka*), dan kelas rendah (*ata*). Sistem ini tidak hanya bertahan dalam struktur sosial tetapi juga berpengaruh pada cara masyarakat memahami kepemimpinan dan kekuasaan. Loyalitas terhadap nilai-nilai adat dan sejarah kerajaan menjadi alasan utama mengapa politik dinasti dapat terus bertahan di desa ini. Namun, di balik fenomena ini terdapat ironi besar. Desentralisasi dan otonomi daerah yang dirancang untuk mendorong demokrasi justru menciptakan ruang bagi tumbuh suburnya politik dinasti. Seperti yang diungkapkan oleh Firdaus & Andriyani (2021), otonomi daerah telah mendorong munculnya kekuatan etnis dan lokal yang sering kali disalahgunakan oleh elit untuk melanggengkan kekuasaan. Fenomena ini juga menunjukkan kegagalan partai politik dalam melakukan regenerasi kepemimpinan, sehingga

menciptakan ruang bagi keluarga tertentu untuk mendominasi. Dalam banyak kasus, etnisitas dan hubungan patron-klien digunakan sebagai alat mobilisasi politik, yang pada akhirnya menghambat perkembangan demokrasi yang inklusif.

Praktik politik dinasti di Desa Banrیمانurung tidak lepas dari konteks sejarah dan geografis wilayah tersebut. Kecamatan Bangkala, yang dulunya merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto, dimekarkan menjadi dua wilayah administratif: Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat. Desa Banrیمانurung berada di wilayah Kecamatan Bangkala Barat dan awalnya terdiri dari tiga desa: Desa Banrیمانurung, Desa Tuju, dan Desa Garassikang. Pemekaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi dalam praktiknya justru memperkuat kekuasaan keluarga tertentu, yang memiliki kontrol penuh atas tanah dan sumber daya di wilayah tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, pengaruh keluarga Karaeng Lolo semakin kuat, tanpa adanya pesaing yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa politik dinasti tidak hanya bertumpu pada kekuatan ekonomi tetapi juga pada kemampuan elit untuk memobilisasi simbol-simbol budaya dan sejarah sebagai alat legitimasi. Masyarakat Desa Banrیمانurung, yang sebagian besar masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat, melihat keluarga kerajaan sebagai pemimpin yang sah dan layak untuk mempertahankan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, praktik politik dinasti di Desa Banrیمانurung mencerminkan dinamika politik lokal di Indonesia yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, demokrasi lokal memberikan ruang bagi partisipasi politik masyarakat. Namun, di sisi lain, sistem ini kerap dimanfaatkan oleh elit untuk melanggengkan kekuasaan mereka melalui berbagai cara, termasuk manipulasi struktur sosial dan budaya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang masa depan demokrasi di tingkat lokal: Apakah demokrasi dapat berkembang dalam sistem yang masih didominasi oleh struktur sosial feodal? Bagaimana otonomi daerah dapat dioptimalkan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan yang lebih inklusif?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengkaji faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan politik dinasti di Desa Banrیمانurung. Dengan menggali lebih dalam aspek sejarah, budaya, dan politik lokal, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana dinasti politik terus bertahan di tengah semangat demokrasi. Studi ini juga berupaya mengeksplorasi implikasi dari praktik politik dinasti terhadap pembangunan lokal, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan politik dinasti dalam pemilihan kepala desa di Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengungkapan fenomena secara mendalam dengan memusatkan perhatian pada konteks sosial, budaya, dan politik setempat (Sugiyono, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti tokoh masyarakat, kepala desa, anggota keluarga dinasti politik, serta warga setempat. Observasi partisipatif juga digunakan untuk memahami interaksi sosial, nilai budaya, dan simbol-simbol kekuasaan yang menjadi dasar legitimasi dinasti politik. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri arsip pemerintahan, catatan sejarah lokal, dan peraturan desa yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan merujuk pada kerangka teori patron-klien dan kekuasaan lokal. Data yang terkumpul diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ahyar et al., 2020). Peneliti memusatkan perhatian pada pola relasi sosial, mekanisme mobilisasi dukungan, serta peran tradisi dan adat dalam mempertahankan kekuasaan dinasti. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor yang memungkinkan kelangsungan politik dinasti di Desa Banrیمانurung.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Dinasti Politik di Desa Banrیمانurung**

Dinasti politik merupakan fenomena yang sering kali diasosiasikan dengan reproduksi kekuasaan yang berbasis pada garis keturunan dan hubungan keluarga (Hara, 2019). Dalam konteks demokrasi lokal, dinasti politik menjadi perhatian karena keberadaannya sering dianggap bertentangan dengan prinsip rekrutmen terbuka dan meritokrasi (Aji & Pratolo, 2018). Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menawarkan studi kasus menarik tentang bagaimana dinasti politik bertahan dan berkembang, meskipun berada dalam sistem demokrasi terbuka. Dengan sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Bangkala, dinasti politik di desa ini bukan hanya sekadar reproduksi kekuasaan, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai budaya, sosial, dan ekonomi yang terinternalisasi dalam masyarakatnya.

Secara historis, Desa Banrimanurung menjadi bagian integral dari wilayah Kerajaan Bangkala, sebuah kerajaan yang mendominasi wilayah Kabupaten Jeneponto bagian barat sejak abad ke-16. Sistem sosial yang feodalistik, yang membagi masyarakat menjadi tiga kelas utama—bangsawan (*karaeng*), rakyat biasa (*to maradeka*), dan kelas pekerja (*ata*)—masih memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Sistem ini memberikan legitimasi kepada *karaeng* atau bangsawan untuk memimpin pemerintahan. Seperti yang disampaikan informan bapak Anas Talanna selaku tokoh masyarakat desa Banrimanurung mengatakan:

“Di Desa ini memang terdapat sistem kepemimpinan yang dipimpin secara turun temurun atau dinasti politik, namun dinasti politik yang terbangun, tidak lepas dari keinginan masyarakat yang masih mempercayai bahwa yang pantas dan mampu memimpin desa banrimanurung adalah seorang *Karaeng* atau keturunannya, jika tidak dipimpin oleh *Karaeng* atau keturunannya maka pemerintahan di desa tersebut tidak akan baik – baik saja dan tidak berjalan sebagaimana mestinya” (Wawancara dengan Anas Talanna, tokoh masyarakat, 22 Juni 2020)

Dari pernyataan di atas, menjelaskan bahwa masyarakat memang masih mempercayai Raja atau dalam Hal ini *Karaeng* dan keturunannya adalah orang yang pantas memimpin suatu pemerintahan. Dalam masyarakat Banrimanurung, seorang *karaeng* bukan sekadar pemimpin administratif, tetapi juga simbol moral dan spiritual. Status ini menjadikan kepemimpinan keluarga kerajaan tidak hanya diterima, tetapi juga dihormati oleh masyarakat.

Kemunculan dinasti politik di Desa Banrimanurung tidak lepas dari sejarah panjang kepemimpinan *karaeng*. Kepala desa pertama, Andi Baso Jaya *Karaeng Baso*, merupakan suami dari adik Raja Bangkala. Kepemimpinan Andi Baso Jaya selama 40 tahun mencerminkan bagaimana pengaruh sejarah dan hubungan kekerabatan dapat menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi. Masyarakat Banrimanurung, yang masih sangat bergantung pada simbol-simbol tradisional dan adat istiadat, melihat kepemimpinan *karaeng* sebagai bentuk kelanjutan dari sistem kerajaan yang telah lama mereka kenal. Dengan demikian, kepemimpinan berbasis dinasti ini diterima sebagai bagian dari tradisi yang sah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori hegemoni Antonio Gramsci. Gramsci berpendapat bahwa dominasi suatu kelompok tidak hanya diperoleh melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan yang dibangun secara ideologis (Siswati, 2018). Dalam konteks Desa Banrimanurung, hegemoni dinasti politik tercapai melalui kombinasi antara kekuasaan tradisional, kontrol ekonomi, dan keterampilan kepemimpinan yang adaptif. *Karaeng* tidak hanya berfungsi sebagai penguasa formal, tetapi juga sebagai pemilik tanah dan alat produksi utama di desa tersebut. Ketergantungan masyarakat pada tanah dan sumber daya yang dikuasai oleh keluarga *karaeng* menciptakan hubungan patron-klien, di mana masyarakat memberikan loyalitas mereka kepada pemimpin yang mereka anggap mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan.

Setelah masa jabatan Andi Baso Jaya, estafet kepemimpinan diteruskan oleh Anas Kalanna, yang meskipun bukan keturunan langsung dari *karaeng*, tetap memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga kerajaan. Setelah Anas Kalanna, kepemimpinan dilanjutkan oleh Andi Rustam BJ *Karaeng Lolo*, putra Andi Baso Jaya. Andi Rustam BJ memimpin selama dua periode sebelum digantikan oleh istrinya, Sumarni Rustam *Karaeng Layu*. Pergantian ini menunjukkan fleksibilitas dinasti politik dalam menyesuaikan diri dengan aturan demokrasi, seperti batasan masa jabatan kepala desa. Setelah masa jabatan istrinya selesai, Andi Rustam BJ kembali memimpin desa untuk periode ketiga, menunjukkan kekuatan simbolik dan pengaruh personal yang masih kuat di masyarakat.

Keberhasilan dinasti politik di Desa Banrimanurung juga dipengaruhi oleh kemampuan para pemimpin dinasti untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Meskipun berasal dari kelas bangsawan, para *karaeng*, seperti Andi Rustam BJ, berhasil menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat melalui pendekatan kultural. Pendekatan ini mencakup penghormatan terhadap nilai-nilai adat istiadat, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan pemberdayaan warga lokal dalam pemerintahan desa. Dalam wawancara Bapak Anas Talanna selaku tokoh masyarakat mengatakan:

“Pada kepemimpinan Andi Rustam BJ masyarakat desa banrimanurung memang merasa aman dan tentram, karena masyarakat merasa terlindungi baik dari kasus pencurian, pembunuhan dan sebagainya” (Wawancara dengan Anas Talanna, tokoh masyarakat, 22 Juni 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas, memperlihatkan kepemimpinan dari keturunan Raja mampu menjalankan pemerintahan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, dengan cara mampu meyakinkan masyarakat dengan menciptakan sebuah rasa keamanan dan ketentraman didalam kehidupan masyarakat, inilah kemudian yang membuat masyarakat masih mempercayai raja dan keturunannya memimpin pemerintahan di Desa Banrimanurung. Dalam hal ini, dinasti politik tidak hanya mendominasi, tetapi juga menciptakan kesepakatan sosial yang memperkuat legitimasi mereka.

Dalam analisis Gramsci, hegemoni total tercapai ketika kelas penguasa mampu mengintegrasikan kepentingan mereka dengan kepentingan masyarakat yang mereka pimpin. Dalam konteks ini, kepemimpinan dinasti di Desa Banrیمانurung dapat dianggap sebagai bentuk hegemoni total, karena berhasil menciptakan hubungan persetujuan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya, simbol kekarajaan, dan kinerja pemerintahan yang dianggap memuaskan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, para pemimpin dinasti juga menghindari perilaku oligarki dengan melibatkan individu dari luar keluarga kerajaan dalam struktur pemerintahan, sehingga menciptakan kesan inklusivitas. Namun, fenomena dinasti politik ini juga menimbulkan pertanyaan kritis. Meskipun masyarakat Desa Banrیمانurung tampaknya menerima dan bahkan mendukung kepemimpinan berbasis dinasti, apakah hal ini benar-benar mencerminkan semangat demokrasi? Menurut Hara (2019), dinasti politik sering kali menghambat regenerasi politik yang lebih inklusif karena mendominasi akses terhadap kekuasaan dan sumber daya politik. Dalam kasus Desa Banrیمانurung, keberadaan dinasti politik dapat dilihat sebagai bentuk kompromi antara tradisi dan demokrasi modern, di mana proses pemilihan langsung tetap dilakukan, tetapi hasilnya hampir selalu menguntungkan keluarga karaeng.

Teori patron-klien juga relevan untuk memahami fenomena ini. Hubungan antara keluarga karaeng dan masyarakat Desa Banrیمانurung dapat dikategorikan sebagai hubungan patron-klien, di mana patron (karaeng) memberikan perlindungan dan sumber daya kepada klien (masyarakat) sebagai imbalan atas loyalitas dan dukungan politik. Dalam sistem seperti ini, kepemimpinan sering kali dinilai berdasarkan kemampuan patron untuk memenuhi kebutuhan klien mereka, daripada berdasarkan kompetensi atau visi yang lebih luas (Aspinall & As'ad, 2016).

Selain itu, peran narasi sejarah dan budaya lokal tidak dapat diabaikan. Seperti yang dicatat oleh Shibghotulloh, Al-Banjari, & Djuyandi, (2020), masyarakat Banrیمانurung memiliki pandangan historis bahwa karaeng adalah simbol kepemimpinan yang ideal, dengan sifat-sifat yang dianggap mampu membawa ketentraman dan kesejahteraan. Narasi ini diperkuat melalui cerita rakyat, tradisi adat, dan struktur sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan cara ini, dinasti politik tidak hanya bertahan, tetapi juga terus diperkuat melalui reproduksi ideologis yang mendalam di masyarakat (Shibghotulloh et al., 2020). Ini sejalan dengan apa yang disampaikan bapak Gaffar selaku masyarakat desa Banrیمانurung, dalam wawancara mengatakan:

“Di desa banrیمانurung orang yang tidak berasal dari keturunan atau keluarga dari raja bangkala sangat sulit mendapatkan dukungan dari masyarakat, karena karisma bangsawan masih sangat kuat, dan masyarakat desa banrیمانurung masih sangat menghormati para bangsawan” (Wawancara dengan Andi Rustam BJ, Kepala Desa Banrیمانurung, 23 Juni 2020)

Dalam konteks Indonesia yang lebih luas, fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana demokrasi lokal dapat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang khas. Meskipun pemilihan kepala desa di Desa Banrیمانurung dilakukan secara terbuka, hasilnya hampir selalu menguntungkan keluarga karaeng. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Aspinall & As'ad (2016) sebagai "demokrasi terbuka dengan pola dinasti," di mana nilai-nilai demokrasi dan tradisi lokal saling berinteraksi untuk membentuk hasil politik yang unik.

Keberhasilan dinasti politik di Desa Banrیمانurung juga menunjukkan bahwa faktor budaya dan sejarah memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi cenderung memberikan dukungan kepada pemimpin yang dianggap mewakili nilai-nilai tersebut. Dalam hal ini, keluarga karaeng berhasil memanfaatkan modal budaya mereka untuk mempertahankan dominasi politik mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa dinasti politik tidak selalu identik dengan stagnasi atau korupsi. Dalam kasus Desa Banrیمانurung, dinasti politik mampu menunjukkan kinerja pemerintahan yang dianggap memuaskan oleh masyarakat, seperti keamanan dan ketertiban desa, serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Hal ini menunjukkan bahwa dinasti politik dapat berfungsi secara efektif dalam konteks di mana nilai-nilai tradisional masih kuat, asalkan pemimpin dinasti mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dinasti politik di Desa Banrیمانurung merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara tradisi, budaya, dan demokrasi. Dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci dan patron-klien, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk dominasi yang didasarkan pada persetujuan ideologis dan ketergantungan ekonomi. Meskipun dinasti politik sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi modern, dalam konteks Desa Banrیمانurung, dinasti ini telah berhasil menciptakan stabilitas politik dan sosial yang diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang demokrasi lokal di Indonesia perlu mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya yang unik di setiap daerah.

### **Faktor Penyebab bertahannya dinasti politik**

Dinasti politik merupakan fenomena yang menarik perhatian dalam lanskap demokrasi lokal di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan bentuk kekuasaan yang tidak hanya mengandalkan proses politik modern, tetapi juga bersandar pada warisan budaya, nilai-nilai tradisional, dan struktur sosial yang telah mengakar. Dalam konteks ini, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, menjadi studi kasus menarik yang menunjukkan bagaimana dinasti politik dapat bertahan dan berkembang di tengah arus demokrasi yang lebih terbuka. Desa ini memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari Kerajaan Bangkala, salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang berdiri sejak abad ke-16. Sejarah dan tradisi lokal di desa ini telah membentuk pola kepemimpinan yang berbasis pada simbol kekarraengan, di mana keluarga bangsawan dianggap sebagai figur ideal untuk memimpin.

Fenomena dinasti politik di Banrimanurung tidak hanya mencerminkan keberlanjutan tradisi lokal tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dinasti dapat hidup berdampingan dengan mekanisme demokrasi modern. Pemilihan kepala desa di Banrimanurung dilakukan secara terbuka dan demokratis, namun hasilnya hampir selalu menguntungkan keluarga Karaeng, yang telah memimpin desa ini selama beberapa generasi. Ini juga dipertegas dengan pernyataan Gaffar selaku warga desa Banrimanurung:

“Kalau Pemilihan Kepala Desa tidak Pernahji kampanye Kr.Lolo Karena tanpa disuruhpun masyarakat sudah pasti memilih Kr.Lolo, begitupun dengan istrinya waktu mencalonkan. Pemilihan desa kemarin, sebenarnya tidak ada yang menjadi lawan dari kr. lolo namun lawan politiknya sengaja didorong hanya sebagai formalitas saja, bahkan istri dari lawan politik kr, lolo pun mengaku tidak memilih suaminya sendiri”(Wawancara dengan Andi Rustam BJ, Kepala Desa Banrimanurung, 23 Juni 2020)

Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik: bagaimana keluarga Karaeng mampu mempertahankan dominasi politik mereka di tengah dinamika demokrasi? Apa saja faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan kekuasaan dinasti ini, dan bagaimana faktor-faktor tersebut terkait dengan nilai-nilai budaya, ekonomi, dan politik lokal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk memahami konteks historis dan sosial Desa Banrimanurung. Sejak masa pemerintahan kolonial, wilayah ini telah menjadi pusat penting dalam struktur pemerintahan lokal, dengan keluarga bangsawan memegang peran sentral dalam mengelola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Setelah otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, tradisi kepemimpinan berbasis dinasti tetap bertahan meskipun sistem pemerintahan telah beralih ke model yang lebih demokratis. Dalam konteks ini, keluarga Karaeng tidak hanya bertindak sebagai pemimpin administratif tetapi juga sebagai simbol moral dan spiritual yang dihormati oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari analisis, teori hegemoni Antonio Gramsci menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk memahami keberlanjutan dinasti politik di Banrimanurung. Menurut Gramsci, dominasi kelas penguasa tidak hanya didasarkan pada kekuatan fisik atau ekonomi tetapi juga pada persetujuan ideologis yang diperoleh melalui integrasi nilai-nilai budaya ke dalam praktik kekuasaan (Windi, 2017). Dalam kasus Banrimanurung, keluarga Karaeng telah berhasil menciptakan hegemoni melalui simbol-simbol tradisional yang mencerminkan nilai-nilai lokal, seperti integritas, moralitas, dan kemampuan untuk menjaga keharmonisan sosial. Hegemoni ini diperkuat oleh narasi sejarah dan adat istiadat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan legitimasi yang sulit digoyahkan oleh aktor politik lain (Siswati, 2018).

Selain teori hegemoni, hubungan patron-klien juga menjadi konsep kunci dalam memahami keberlanjutan dinasti politik di desa ini. Keluarga Karaeng, sebagai pemilik tanah dan sumber daya ekonomi utama di desa, telah membangun hubungan patron-klien yang kuat dengan masyarakat. Dalam hubungan ini, keluarga Karaeng memberikan perlindungan, bantuan ekonomi, dan akses sosial kepada masyarakat, yang sebagai imbalannya memberikan loyalitas dan dukungan politik (Harjudin & Zuada, 2020). Hubungan ini menciptakan struktur kekuasaan yang saling bergantung, di mana masyarakat melihat keluarga Karaeng sebagai pelindung yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, keberhasilan dinasti politik di Banrimanurung tidak hanya bergantung pada faktor sejarah dan budaya. Keluarga Karaeng juga menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan aturan dan dinamika politik modern. Ketika aturan pembatasan masa jabatan kepala desa diberlakukan, keluarga ini dengan cerdas mengatur suksesi kepemimpinan untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan mereka (Fitri, 2019). Misalnya, setelah masa jabatan Andi Rustam BJ Karaeng Lolo selesai, kepemimpinan diteruskan oleh istrinya, Sumarni Rustam Karaeng Layu, sebelum akhirnya kembali ke tangan Andi Rustam BJ. Strategi ini menunjukkan kemampuan keluarga Karaeng untuk memanfaatkan struktur demokrasi modern sambil tetap mempertahankan legitimasi tradisional mereka.

Studi kasus Banrimanurung menawarkan wawasan penting tentang bagaimana dinasti politik dapat bertahan di tengah sistem demokrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial-budaya yang unik, di mana tradisi dan modernitas saling bersinergi untuk menciptakan stabilitas politik. Dalam konteks ini, dinasti politik bukan hanya tentang dominasi kekuasaan

tetapi juga tentang kemampuan untuk menciptakan persetujuan sosial melalui nilai-nilai budaya, hubungan ekonomi, dan kinerja pemerintahan yang memuaskan (Khalib Gadafi & Sasmi Nelwati, 2024). Dengan latar belakang ini, analisis berikutnya akan mendalami empat faktor utama yang menyebabkan dinasti politik di Desa Banrimanurung mampu bertahan hingga saat ini. Setiap faktor akan dijelaskan secara rinci dengan menggunakan teori yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana keluarga Karaeng berhasil menjaga posisi mereka sebagai pemimpin politik lokal selama beberapa generasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik lokal di Indonesia dan bagaimana tradisi dapat hidup berdampingan dengan demokrasi modern. Adapun, faktor yang menyebabkan Dinasti Politik dapat bertahan di Desa Banrimanurung hingga hari ini ialah:

#### *Legitimasi Tradisional: Warisan Sejarah dan Simbol Kekaraengan*

Legitimasi tradisional merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan dinasti politik di Desa Banrimanurung. Desa ini memiliki akar sejarah yang mendalam sebagai bagian dari Kerajaan Bangkala, salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang berdiri sejak abad ke-16. Dalam masyarakat yang pernah menjadi bagian dari sistem kerajaan, kepemimpinan sering kali tidak hanya didasarkan pada kemampuan administratif, tetapi juga pada simbol-simbol yang diasosiasikan dengan kekuasaan moral dan spiritual.

Di Desa Banrimanurung, keluarga Karaeng tidak hanya dilihat sebagai pemimpin politik tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan adat istiadat. Sebagai contoh, kepala desa pertama, Andi Baso Jaya Karaeng Baso, adalah seorang bangsawan yang dihormati karena hubungan kekerabatannya dengan keluarga kerajaan. Selama lebih dari 40 tahun masa kepemimpinannya, ia berhasil membangun citra sebagai pemimpin ideal yang mampu menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Ini di pertegas informan bapak Andi Rustam Bj, beliau dalam wawancara menegaskan bahwa selama ia menjabat memprioritaskan keamanan dan kesejahteraan para warga, seperti yang dikutip dalam wawancara berikut:

“Saya menjadi kepala desa bukan karena kemauan pribadi, tetapi karena diminta oleh warga jadi saya meng”iya”kan. Dari situ saya berkomitmen untuk membantu warga. Karena saya orangnya tidak pintar (dalam hal pemerintahan). Jadi saya itu bantu biar bagaiman kampung ini aman saja. Masyarakat tidak ada kelaparan. Pokoknya dibantu yang bisa di bantu”(Wawancara dengan Andi Rustam BJ, Kepala Desa Banrimanurung, 23 Juni 2020)

Pernyataan ini dikuatkan dengan pernyataan bapak Gaffar dalam wawancara yang mengatakan:

“selama karaeng (Andi Rustam BJ) menjabat desa ini tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada yang bertikai atau orang luar sampai mau ganggu. Tiap bulan juga karaeng data itu warga yang harus di kasih bantuan. Selama ini masyarakat senang beliau jadi kepala desa”(Wawancara dengan Gaffar, warga, 22 Juni 2020)

Pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa kepemimpinan Andi Rustam BJ sebagai Kepala Desa Banrimanurung tidak sebatas memanfaatkan simbol ke-karaengan-nya. Beliau betul-betul menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dan membangun kepercayaan kepada masyarakat. Sehingga dengan pola seperti itu simbol ke-karaengan yang melekat pada diri Andi Rustam BJ dipersepsikan positif oleh masyarakat. Sehingga, kepemimpinannya tidak hanya dilihat sebagai fungsi administratif tetapi juga sebagai kelanjutan dari nilai-nilai kekaraengan yang diwariskan secara turun-temurun.

Teori hegemoni Antonio Gramsci memberikan kerangka yang relevan untuk memahami legitimasi tradisional ini (Gill, 1993) (Siswati, 2018). Menurut Gramsci, dominasi tidak hanya dicapai melalui kekerasan atau paksaan, tetapi juga melalui persetujuan ideologis yang diperoleh dari masyarakat (Gill, 1993). Dalam konteks Desa Banrimanurung, legitimasi keluarga Karaeng diperkuat melalui simbol-simbol tradisional yang diterima sebagai kebenaran sosial. Hegemoni ini tercapai karena keluarga Karaeng berhasil menyatukan nilai-nilai budaya lokal dengan kekuasaan politik mereka, menciptakan rasa kesatuan antara masyarakat dan pemimpin.

Simbol kekaraengan yang kuat menciptakan narasi yang berakar dalam pikiran masyarakat, di mana kepemimpinan dinasti tidak hanya diterima tetapi juga dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling sesuai. Hal ini menciptakan stabilitas politik yang sulit digoyahkan oleh aktor-aktor politik lain. Bahkan dalam konteks demokrasi modern, simbol kekaraengan ini tetap menjadi alat legitimasi yang efektif, menunjukkan bagaimana tradisi dapat hidup berdampingan dengan sistem politik yang berubah.

### *Pengaruh Budaya dan Kekuatan Nilai-Nilai Adat*

Budaya dan nilai-nilai adat memainkan peran penting dalam mempertahankan dinasti politik di Desa Banrimanurung. Masyarakat desa ini dikenal memiliki penghormatan yang tinggi terhadap tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, kepemimpinan dinasti politik keluarga Karaeng tidak hanya dipandang sebagai otoritas administratif, tetapi juga sebagai pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang dianggap sakral.

Salah satu nilai adat yang menjadi dasar penting adalah pangngadakkang atau nilai-nilai kemanusiaan. Nilai ini mencakup integritas, moralitas, dan kemampuan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin yang mampu menanamkan nilai-nilai ini dianggap layak untuk memimpin desa. Keluarga Karaeng, melalui perilaku yang sesuai dengan norma-norma adat ini, berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sejalan yaang di sampaikan oleh bapak Anas Talanna, dalam wawancara mengatakan:

“Masyarakat desa banrimanurung masih menjunjung tinggi nilai pangngadakkang yang sudah terbangun sejak dulu, dan itu sudah menjadi pandangan hidup yang harus di akui oleh semua masyarakat.” (Wawancara dengan Anas Talanna, tokoh masyarakat, 22 Juni 2020)

Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni total dicapai ketika nilai-nilai budaya lokal berhasil diintegrasikan ke dalam praktik kekuasaan. Dalam kasus Banrimanurung, keluarga Karaeng memanfaatkan nilai-nilai adat untuk membangun legitimasi politik mereka. Dengan menunjukkan kesetiaan terhadap adat istiadat, mereka tidak hanya mendapatkan dukungan politik tetapi juga membangun hubungan emosional yang mendalam dengan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku politik masyarakat.

Kehormatan terhadap nilai-nilai adat juga terlihat dalam cara masyarakat memandang pemimpin sebagai penjaga tradisi. Misalnya, masyarakat sering kali lebih memilih pemimpin dari keluarga Karaeng karena mereka percaya bahwa keluarga ini memiliki kemampuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang penting bagi identitas masyarakat. Dengan demikian, budaya tidak hanya menjadi alat legitimasi tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi politik keluarga Karaeng.

### *Hubungan Patron-Klien dan Kontrol Ekonomi*

Hubungan patron-klien merupakan faktor lain yang mendukung keberlanjutan dinasti politik di Desa Banrimanurung. Hubungan ini, yang melibatkan pertukaran perlindungan dan dukungan antara patron (keluarga Karaeng) dan klien (masyarakat), telah menjadi salah satu pilar kekuasaan politik lokal. Keluarga Karaeng, sebagai pemilik sebagian besar tanah dan alat produksi di desa, memiliki kontrol ekonomi yang signifikan. Ketergantungan masyarakat pada sumber daya ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara patron dan klien.

Dalam hubungan ini, keluarga Karaeng menyediakan perlindungan, akses ekonomi, dan bantuan sosial kepada masyarakat. Sebagai imbalannya, masyarakat memberikan loyalitas dan dukungan politik kepada keluarga ini. Seperti yang di sampaikan salah satu warga bapak Gaffar dalam wawancara mengatakan:

“Karaeng itu tidak memandang derajat masyarakatnya dia tetap berinteraksi seperti masyarakat pada umumnya, dan menjunjung tinggi nilai pangngadakkang yang ada. Dia selalu membantu masyarakat yang perlu. Bahkan aparat desa tidak ada yang dari keluarganya. Semua dari masyarakat yang memmmang dianggap bisa. Selain untuk menjalankan adminstrasi juga membantu ekonomi mereka.” (Wawancara dengan Gaffar, warga, 22 Juni 2020)

Dalam sistem yang berbasis pada ketergantungan ekonomi, sulit bagi aktor politik lain untuk bersaing dengan keluarga Karaeng karena mereka memiliki kendali atas sumber daya yang vital bagi masyarakat. Teori patron-klien menjelaskan bahwa ketergantungan ekonomi dapat menciptakan stabilitas politik yang kuat (Geys & Smith, 2017). Ketika masyarakat merasa bergantung pada patron untuk kebutuhan dasar mereka, mereka cenderung mendukung patron tersebut dalam setiap kontestasi politik. Dalam kasus Desa Banrimanurung, hubungan patron-klien ini tidak hanya mempertahankan kekuasaan keluarga Karaeng tetapi juga memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat.

Hubungan ini juga menunjukkan bagaimana dinasti politik dapat memanfaatkan kontrol ekonomi untuk menciptakan stabilitas politik (Logica et al, 2023). Dengan menyediakan sumber daya dan bantuan kepada masyarakat, keluarga Karaeng membangun citra sebagai pelindung masyarakat. Citra ini tidak hanya membantu mereka memenangkan dukungan politik tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang mendalam dengan masyarakat.

### *Fleksibilitas dan Adaptasi terhadap Sistem Demokrasi*

Kemampuan keluarga Karaeng untuk beradaptasi dengan perubahan dalam sistem demokrasi modern adalah faktor terakhir yang mendukung keberlanjutan dinasti politik mereka. Ketika aturan pembatasan masa jabatan kepala desa diberlakukan, keluarga ini dengan cerdas mengatur suksesi kepemimpinan mereka. Misalnya, setelah masa jabatan Andi Rustam BJ Karaeng Lolo selesai, kepemimpinan desa diteruskan oleh istrinya, Sumarni Rustam Karaeng Layu. Setelah masa jabatan istrinya selesai, Andi Rustam BJ kembali mencalonkan diri dan memenangkan pemilihan dengan dukungan yang besar.

Tabel 1. Daftar Kepala Desa Banrیمانurung

<b>Nama Kepala Desa</b>	<b>Lama Masa Jabatan</b>
Andi Baso Jaya	Kepala Desa Pertama (1 Periode)
Anas kalanna	Kepala Desa Kedua (1 Periode)
Andi Rustam BJ Karaeng Lolo	Kepala Desa Ketiga (2 Periode)
Suharni Karaengr Layu (Istri Karaeng Lolo)	Kepala Desa Keempat (1 Periode)
Andi Rustam BJ Karaeng Lolo	1 Periode

Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara (2020)

Adaptasi ini menunjukkan bahwa keluarga Karaeng tidak hanya mengandalkan simbol tradisional tetapi juga memanfaatkan strategi politik modern untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, fleksibilitas ini merupakan elemen kunci dari dominasi yang tidak mengandalkan pemaksaan semata, melainkan persetujuan aktif dari masyarakat. Kelas penguasa yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan sosial tanpa kehilangan legitimasi akan lebih mampu mempertahankan dominasinya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, keluarga Karaeng menunjukkan kapasitas untuk menyerap nilai-nilai demokrasi elektoral tanpa kehilangan identitas aristokratiknya. Mereka mengelola modal simbolik dan modal sosial secara simultan—yakni dengan tetap menjaga garis keturunan dan nilai-nilai adat, sembari aktif membangun komunikasi politik yang adaptif dan populis. Hal ini ditegaskan oleh salah satu tokoh masyarakat desa Anas Talanna, yang menyatakan:

“Dari dulu Karaeng memang dihormati, tapi sekarang mereka juga pandai mengikuti zaman. Kalau ada bantuan, mereka yang paling cepat turun tangan. Mereka tetap dihargai bukan cuma karena darah biru, tapi juga karena mereka tahu bagaimana menjaga orang-orangnya.” (Wawancara dengan Anas Talanna, tokoh masyarakat, 22 Juni 2020)

Kutipan ini menunjukkan bahwa legitimasi keluarga Karaeng tidak hanya bertumpu pada status kultural warisan masa lalu, tetapi juga dikonstruksi ulang melalui praktik-praktik pelayanan dan representasi yang relevan dengan kebutuhan kontemporer warga. Strategi seperti ini memperlihatkan kecerdasan politik yang memadukan loyalitas tradisional dan kepekaan terhadap demokrasi elektoral. Dengan menjaga relasi personal yang kuat, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan terlibat aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan, keluarga ini berhasil membentuk *blocs of consent* (blok persetujuan) yang menopang posisi mereka dalam struktur kekuasaan lokal. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa dinasti politik dapat bertahan di lingkungan yang berubah asalkan mereka mampu menyesuaikan diri dengan dinamika baru (Geys, 2017). Dalam kasus Desa Banrیمانurung, keluarga Karaeng berhasil menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas dapat hidup berdampingan, menciptakan sinergi yang memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin politik lokal.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan politik dinasti di Desa Banrیمانurung. Dengan menggali lebih dalam aspek sejarah, budaya, dan politik lokal, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana dinasti politik terus bertahan di tengah semangat demokrasi. Studi ini juga berupaya mengeksplorasi implikasi dari praktik politik dinasti terhadap pembangunan lokal, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Dinasti politik di Desa Banrیمانurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, adalah contoh menarik tentang bagaimana tradisi dan budaya dapat hidup berdampingan dengan demokrasi modern. Keberlanjutan dinasti politik ini didukung oleh empat faktor utama yang saling terkait. Pertama, legitimasi tradisional yang berasal dari warisan sejarah Kerajaan Bangkala memberikan kekuatan simbolis kepada keluarga Karaeng, yang dipandang sebagai penjaga nilai-nilai adat dan moral masyarakat. Simbol kekarraengan ini telah menjadi dasar persetujuan sosial yang sulit digoyahkan. Kedua, pengaruh budaya dan nilai-nilai adat, seperti Pangngadakkang, memperkuat hubungan emosional antara pemimpin dan

masyarakat. Dalam konteks ini, keluarga Karaeng mampu membangun kepercayaan dengan menjunjung tinggi tradisi dan memenuhi harapan masyarakat akan kepemimpinan yang harmonis dan adil. Ketiga, hubungan patron-klien memainkan peran kunci, di mana keluarga Karaeng menyediakan perlindungan dan sumber daya kepada masyarakat sebagai imbalan atas loyalitas politik. Ketergantungan ekonomi ini menciptakan struktur kekuasaan yang saling menguntungkan dan stabil. Keempat, kemampuan keluarga Karaeng untuk beradaptasi dengan sistem demokrasi modern, seperti melalui pengaturan suksesi kepemimpinan yang strategis, menunjukkan fleksibilitas mereka dalam mempertahankan dominasi politik. Dengan memadukan tradisi dan modernitas, dinasti ini menciptakan stabilitas yang diterima masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang unik, menekankan pentingnya memahami konteks lokal dalam menganalisis keberlanjutan dinasti politik.

### Daftar Pustaka

- Agus Dedi. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 92–101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>
- Agustinus, L. (2014). *Politik Lokal & Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Aspinall, E., & As'ad, M. U. (2016). Understanding family politics: Successes and failures of political dynasties in regional Indonesia. *South East Asia Research*, 24(3), 420–435. <https://doi.org/10.1177/0967828X16659571>
- Dona, F. (2022). Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(2), 123–145. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v7i2.6254>
- Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama, Dan Etnis Di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(2), 47. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52>
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 04(1), 91–111. Diambil dari <https://doi.org/10.31629/kemudi>.
- Geys, B. (2017). Political Dynasties, Electoral Institutions and Politicians' Human Capital. *Economic Journal*, 127(605), F474–F494. <https://doi.org/10.1111/ecoj.12444>
- Geys, B., & Smith, D. M. (2017). Political Dynasties in Democracies: Causes, Consequences and Remaining Puzzles. *Economic Journal*, 127(605), F446–F454. <https://doi.org/10.1111/ecoj.12442>
- Gill, S. (1993). *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=Opkof1vyDAgC>
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Hadrawi, M., & Fakultas. (2017). Bangkala dan Binamu: Suatu Kajian Naskah Lontara' Dalam Sosial-Politik Jeneponto Kuno. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 2(2), 116–133. Diambil dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/etnosia/article/view/19610>
- Hara, T. (2019). Defeating a political dynasty: Local progressive politics through people power volunteers for reform and bottom-up budgeting projects in Siquijor, Philippines. *Southeast Asian Studies*, 8(3), 413–439. [https://doi.org/10.20495/seas.8.3\\_413](https://doi.org/10.20495/seas.8.3_413)
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Utami F. E., Sukmana, D. J. & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu
- Harjudin, L. O., & Zuada, L. H. (2020). 'Musim Semi' Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Transformative*, 6(1), 107–126. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.6>
- Khalib Gadafi, & Samsi Nelwati. (2024). Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Journal Innovation In Education*, 2(3), 133–148. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1384>
- Logica, J. S., Lapungge, M. T., Arsi, A., Makassar, U. N., Daerah, P., & Politik, A. (2023). *Antara Keturunan Dan Kepemimpinan : Menilik Dinasti Politik Kota Makassar Melalui Lensa Antropologi*. 3(2), 1–8.
- Marwiyah, S., Wicaksona, S. A., Wahyuni, V. N., Kharimah, M., & Tiantoro, Y. (2022). Utopia Konsep Kepemimpinan Pasca Reformasi: Embrio Despotisme dan Dinasti Politik. *Sospoli*, 2(5), 263–272.
- Shibghotulloh, D. A. M., Al-Banjari, H., & Djuyandi, Y. (2020). Peran Aktor Dalam Proses Pembentukan Dinasti Politik (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarta). *Polistaat*, 3(1), 26–48. <https://doi.org/10.23969/paradigmopolistaat.v3i1.2931>
- Siswati, E. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 5(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sujarwoto, S. (2015). Desentralisasi, Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.02.1>

- Syamsul Hidayat, M., & Eko Wardani, S. B. (2022). Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 75–87. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.249>
- Wahyu Aji, T. S., & Pratolo, S. (2018). Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi : Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 153–170. <https://doi.org/10.18196/rab.020229>
- Windi, R. (2017). Dinasti Politik dalam Pemerintahan Desa di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. *Jurnal Departemen Politik dan Ilmu pemerintahan*, 6(3), 12–34.